

Sumbangan Konsep Fusi Horizon dalam Hermeneutika Gadamer bagi Proses Perumusan Sila Pertama Pancasila

Yasintus Harjon

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang. E-mail: cainharjon@gmail.com

Abstract: *This paper focuses on a deep examination of the concept fusion of horizons Gadamer's hermeneutics and its contribution to the formulation process of the first principle of Pancasila. In the public sphere, there are various divergent views on the text of "religious pluralism in Indonesia" during the formulation of the first principle of Pancasila. Some founding fathers and national figures interpreted and understood it only within the scope of a specific religion (Islam), while others viewed it in a broader and more profound sense. The Unitary State of the Republic of Indonesia encompasses not only Islam but also other religions. Therefore, the text of "religious pluralism in Indonesia" should be understood and formulated as "the belief in the One Supreme God" rather than "the belief in God with the obligation to follow Islamic law for its adherents." The methodology employed in this article is literature review, involving critical and in-depth examination of various relevant sources on the discussed topic. This paper finds that the first principle of Pancasila, "the belief in the One Supreme God," is the result of horizon fusion between the founding fathers and national figures regarding the text of "religious pluralism in Indonesia." Horizon fusion occurs when each of them dares to transcend their preconceived understanding of the text, being open to each other, and engaging in dialogue. Thus, the horizon fusion forms the principle of "the belief in the One Supreme God" that embraces all religions without excluding any.*

Keywords: *Hermeneutics; Horizon Fusion; Religious Pluralism; Pancasila.*

Abstrak: Fokus tulisan ini ialah mengkaji secara mendalam gagasan fusi horizon dalam hermeneutika Gadamer dan sumbangannya bagi proses perumusan sila pertama Pancasila. Fakta di ruang publik terdapat aneka perbedaan pandangan terhadap teks 'pluralisme agama Indonesia' pada saat proses perumusan sila pertama Pancasila. Sebagian *founding fathers* dan tokoh-tokoh nasional membaca dan memahaminya hanya sebatas agama tertentu (Islam). Sementara beberapa yang lain melihat dan mengertinya jauh lebih luas dan mendalam. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya Islam, tetapi mencakup agama-agama yang lain. Teks 'pluralisme agama Indonesia' dengan demikian harus dipahami dan dirumuskan sebagai 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukan 'Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.' Adapun metodologi yang digunakan dalam artikel ini ialah kajian pustaka dengan membaca secara kritis dan mendalam berbagai literatur terkait tema yang dibahas. Tulisan ini menemukan bahwa sila pertama Pancasila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' merupakan hasil fusi horizon *founding fathers* dan tokoh-tokoh nasional atas teks 'pluralisme agama Indonesia'. Fusi horizon terjadi ketika masing-masing di antara mereka berani melampaui pra-pemahaman mereka atas teks tersebut, saling terbuka, dan berdialog satu sama lain. Sehingga terbentuklah fusi horizon, yakni sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' yang merangkul semua agama tanpa ada yang tereliminasi.

Kata Kunci: *Hermeneutika; Fusi Horizon; Pluralisme Agama; Pancasila.*

1. Pendahuluan

Hermeneutika merupakan sebuah kegiatan atau kesibukan untuk menyingkapkan makna sebuah teks (Hidayat & Abdul, 2021). Teks berarti bukan hanya dalam bentuk tulisan, patung, lukisan, dan simbol-simbol, tetapi juga mencakup seluruh realitas hidup manusia. Sebagai makhluk rasional, aktivitas memahami dan menggali makna merupakan sebuah keniscayaan dan bagian integral dari keseharian manusia. Dalam aktivitas itu, ruang lingkup pemahaman manusia adalah seluruh

pengalaman hidupnya yang semuanya ada dalam teks-teks. Pada hakikatnya, aktivitas memahami dan menggali makna selalu dilakukan bersama “yang lain”, sebab manusia adalah makhluk relasional sehingga berciri dialogis. Selain berciri dialogis, memahami juga berciri epistemologis. Artinya, memahami selalu menyangkut perkara pengetahuan yang menyentuh persoalan kebenaran yakni benar-salah. Sehingga, dalam konteks ini memahami selalu ada dalam dua dikotomi yakni memahami secara benar dan memahami secara salah.

Pluralisme agama di Indonesia adalah sebuah teks. Karena merupakan teks, maka realitas ini sangat erat kaitannya atau masuk dalam wilayah perkara memahami teks secara benar dan memahami secara salah. Persoalan itu dapat ditemukan dalam usaha merumuskan butir pertama Pancasila di mana cukup sulit menemukan titik temu antara horizon dari setiap partikularitas yang ada. Sebagian *founding fathers* dan tokoh-tokoh masyarakat membaca teks ‘pluralisme agama Indonesia’ secara sempit yakni hanya sebatas agama Islam. Misalnya tampak jelas pada Piagam Jakarta yang mana sila pertama Pancasila didasarkan atas syariat Islam, yakni ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya’. Sementara yang lain melihatnya secara holistik bahwa Indonesia terdiri dari aneka agama dan kepercayaan tradisional. Indonesia tidak bisa didasarkan atas syariat Islam, sebab tidak mengakomodir semua agama atau kepercayaan yang lain. Karena itu, PPKI kemudian mengubah butir pertama Piagam Jakarta menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Jika bertolak pada gagasan Gadamer, sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ tiada lain adalah hasil dari proses fusi horizon dari *founding fathers* bangsa Indonesia. Horizon para pendiri bangsa berjumpa dan berdialog satu sama lain, sehingga terjadi fusi horizon yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang melampaui sekat eksklusivitas ajaran agama tertentu.

Namun, harus diakui bahwa perjumpaan dan peleburan horizon *founding fathers* dan tokoh-tokoh nasional tidak serta merta menjadi tanda berakhirnya diskursus pelik atas teks ‘pluralisme agama Indonesia’. Dewasa ini masalah seputar radikalisme agama terus menggerus citra luhur Pancasila sebagai landasan ideologis NKRI. Oknum tertentu kerap memiliki tendensi mengembalikan sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ menuju rumusan sempit-egoistis Piagam Jakarta ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.’ Usaha itu tidak hanya pada tataran konseptual (berupa doktrinisasi), tetapi nyata dalam tataran praktis. Misalnya dapat ditemukan dalam aneka peristiwa, seperti pemboman rumah ibadat agama minoritas, berbagai otonomi daerah yang bernuansa diskriminatif atas agama lain, isu Islamisasi, munculnya kelompok dan organisasi terlarang (HTI, FPI, dst.). Sehingga, realitas semacam ini mendesak setiap warga negara untuk terus melakukan dialog terbuka demi terciptanya fusi horizon, sehingga semakin meningkatnya semangat toleransi dan membuminya keharmonisan di tengah *societas*.

Konsep Hermeneutika menurut Gadamer banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Sofyan A. P. Kau (2014) dalam penelitiannya berjudul ‘Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir’ menemukan keterkaitan yang erat antara ke-empat teori dalam hermeneutika Gadamer, yaitu prasangka hermeneutik, lingkaran Hermeneutika, peralihan dari "Aku-Engkau" menjadi "Kami", dan hermeneutika dialektis dengan tafsir. Bahkan menurutnya, ke-empat teori tersebut bukan sesuatu yang baru dalam ilmu tafsir dan memiliki orientasi yang sama, yakni pemahaman yang benar dan otentik sebuah teks. Sementara itu Hasyim Hasanah (2017), melihat bahwa pemahaman tersebut bukanlah hasil pilihan sadar pembaca terhadap teks, tetapi sebuah tanggapan atau tafsiran dari pengalaman dalam horizonnya, yang bersifat historis, sesuai dengan dunia masing-masing (dunia teks, dunia penulis, dan dunia penerjemah atau pembaca) yang didasarkan pada prasangka. Gagasan ini digunakan Hasanah dalam penelitiannya untuk memahami makna wayang, yakni sebagai media dakwah.

Selain itu, Lina Kushidayati (2014) menemukan keselarasan konsep hermeneutika Gadamer dengan *double movement* yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman (meski dalam nuansa berbeda) dalam menafsir teks al-Qur'an dan memahami teks hukum. Keselarasan itu tampak dalam usaha memahami teks hukum dan teks al-Qur'an, di mana hakim atau penafsir teks al-Qur'an bergerak dari dua arah, yakni pembaca dari masa kini memahami konteks teks masa lalu, dan dari masa lalu ke masa kini. Dalam memahami teks hukum, hakim saat ini selalu melihat keputusan-keputusan hakim sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan kasus tertentu yang serupa atau mirip pada masa kini. Demikianpun dalam penafsiran teks suci, penafsir berusaha memahami konteks teks masa lalu dan relevansinya saat ini. Tujuannya ialah agar penafsir hukum dan penafsir teks suci dapat memahami makna teks berdasarkan konteks historisnya pada masa lalu dan memahami konteks sekarang, sehingga makna teks masa lalu tidak diaplikasikan begitu saja pada masa kini tetapi sesuai dengan konteks saat ini.

Emanuel Prasetyono (2022) masih dalam konteks yang sama menemukan aktualitas gagasan Gadamer dalam membangun dialog antarbudaya. Menurutnya, fusi horizon membantu seseorang menggali jati diri budayanya sendiri dan membangun dialog dengan budaya lain. Atas dasar itu, masalah-masalah antarbudaya yang terus terjadi di Indonesia mendesak setiap pribadi berani terbuka dalam dialog, saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Sehingga, terciptalah kehidupan bersama yang harmonis, solid, dan respek atas nilai-nilai kemanusiaan di tengah bangsa yang multikultural.

Beberapa penelitian di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa gagasan hermeneutika Gadamer penting dalam usaha membangun dialog antarbudaya, ilmu tafsir (hukum dan teks al-Qur'an), dan dalam menggali makna wayang. Berbeda dengan penelitian terdahulu, kebaruan tulisan ini ialah bahwa gagasan fusi horizon dalam hermeneutika Gadamer memberikan sumbangan yang sangat besar bagi proses perumusan sila pertama Pancasila. Apa yang diuraikan Gadamer tentang pra-pemahaman, lingkaran hermeneutis, relasi 'aku-engkau' menjadi 'kami', hermeneutika dialektis, dan fusi horizon mengakar kuat dalam proses perumusan sila pertama Pancasila. Sehingga, sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' adalah hasil fusi horizon itu sendiri. Karena itu, kajian ini sangat penting dilakukan untuk mengisi ruang kosong dalam tulisan sebelumnya.

2. Pembahasan

2.1. Hermeneutika Menurut Gadamer

Aktivitas membaca dan memahami sebuah teks pada dasarnya selalu berciri dialogal. Bahkan menurut Gadamer, aktivitas itu tidak hanya melibatkan dialog, tetapi sekaligus juga membangun sintesis antara tiga dunia, yaitu dunia teks, dunia pengarang, dan dunia pembaca. Ketiga hal ini masing-masing di antaranya mempunyai konteksnya tersendiri, sehingga dalam membaca dan memahami sebuah teks membutuhkan pertimbangan yang serius. Apabila salah satu dari ketiganya diabaikan, maka pembaca tidak akan menemukan makna autentik dari sebuah teks. Atau pembaca hanya akan menemukan pemahaman yang dangkal. Karena itu, Gadamer mengajukan beberapa teori agar pembaca dapat sampai kepada pemahaman yang benar dan mendalam.

Pertama, konsep "prasangka hermeneutik". Prasangka hermeneutik yang dimaksud Gadamer ialah merujuk kepada aneka asumsi pra-konseptual yang membentuk pemahaman pembaca terhadap suatu teks atau realitas. Prasangka hermeneutik selalu melekat dalam setiap pribadi atau pembaca dan dalam aktivitas memahami pembaca tidak bisa menghindari hal tersebut. Menurut Gadamer, prasangka atau pra-pemahaman sudah menjadi bagian integral dari proses memahami, bahkan pembaca tidak akan bisa melakukan interpretasi kalau tidak memiliki prasangka. Prasangka hermeneutik yang memengaruhi pemahaman pembaca itu

mencakup beberapa hal, seperti latar belakang budaya, bahasa, agama, pengalaman, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Baginya, prasangka ini membentuk pemahaman kita tentang teks atau realitas dan menjadi kerangka referensi yang membantu kita memahami sebuah teks. Selain itu, prasangka hermeneutik juga dapat menjadi tantangan dalam memahami teks secara autentik dan obyektif. Atas dasar itu, adalah penting untuk bertindak kritis dan melampaui prasangka tersebut.

Kedua, 'lingkaran hermeneutika'. Bagi Gadamer, prasangka hermeneutik tidak lain merupakan titik berangkat yang krusial dalam memahami sebuah teks. Dalam proses memahami suatu teks, pembaca dituntut untuk sungguh 'mengerti' teks yang ada. Menurutnya, 'mengerti' adalah suatu proses yang melingkar. Lingkaran hermeneutika mengacu pada hubungan timbal balik antara bagian-bagian dan keseluruhan dalam proses interpretasi. Pemahaman teks atau entitas yang bermakna melibatkan gerakan melingkar antara bagian-bagian dan keseluruhan, di mana interpretasi bagian-bagian dipengaruhi oleh pemahaman keseluruhan, dan sebaliknya. Gerakan melingkar ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap objek interpretasi.

Menurut Gadamer, lingkaran hermeneutika bukanlah batasan atau masalah yang harus diatasi, tetapi merupakan sesuatu yang inheren dari proses interpretasi. Dalam lingkaran hermeneutika, tidak ada interpretasi yang definitif atau final. Setiap interpretasi membangun dan memperkaya pemahaman yang datang sebelumnya. Gerakan melingkar pemahaman ini mengarah pada penyempurnaan dan perluasan pengetahuan kita secara terus-menerus, memungkinkan keterlibatan yang lebih komprehensif dengan objek interpretasi. Prasangka atau pra-pemahaman akan mengalami transformasi menjadi pemahaman yang lebih dalam dan autentik melalui proses membaca teks. Proses inilah yang disebut oleh Gadamer sebagai "The hermeneutical circle" (lingkaran hermeneutika).

Ketiga, konsep "Aku-Engkau" menjadi "Kami". Menurut Gadamer, dialog yang produktif, seperti dialog kita dengan teks, akan terjadi ketika subjek-objek "aku-engkau" telah tergantikan oleh "kami". Gadamer mengambil konsep "Aku-Engkau" dari Martin Buber, yang menyoroti pertemuan antara subjek dan objek sebagai pengalaman personal dan relasional. Gadamer mengembangkan konsep ini dengan menekankan aspek komunal dari interpretasi. Ia berpendapat bahwa pemahaman bukanlah tindakan individu semata, tetapi dibentuk oleh partisipasi kolektif dan dialog dalam komunitas. Proses interpretasi melibatkan penyatuan perspektif, pertukaran gagasan, dan usaha bersama untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Dalam proses itu, seiring berjalannya interpretasi, pemisahan awal antara subjek dan objek mulai larut, memberikan ruang bagi keterlibatan komunal dan makna bersama. Transformasi ini menandakan peralihan dari subjektivitas yang terisolasi menuju pemahaman yang lebih inklusif dan berada dalam konteks sosial.

Keempat, hermeneutika dialektis. Gadamer mengakui bahwa pemahaman mendalam sebuah teks tidak bisa melalui pendekatan yang semata-mata bersifat subyektif dan obyektif. Atau makna autentik sebuah teks tidak dapat tercapai melalui metodologi yang dibangun. Sebaliknya, kebenaran diperoleh melalui dialog dan interaksi antara subyek dan obyek interpretasi. Melalui dialog, terjadilah konflik dan perbedaan pemahaman. Konflik dan perbedaan itu terus menerus direvisi dan dikritisi, sehingga sampai pada pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam. Pemahaman yang lebih holistik dan mendalam muncul melalui refleksi kritis terhadap prasangka subjek dan dialog yang berkelanjutan dengan objek interpretasi. Kunci pemahaman yang mendalam, holistik, dan autentik adalah partisipasi dan keterbukaan, bukan manipulasi dan pengendalian.

2.2. Fusi Horizon dalam Hermeneutika Gadamer

Gadamer memperkenalkan konsep "fusi horizon" (*Horizontverschmelzung*) yang merujuk pada proses di mana horizon-horizon penerjemah dan objek interpretasi saling berinteraksi dan menyatu, menghasilkan pemahaman bersama. Fusi horizon memuat relasi saling keterbukaan, mendengarkan, kesediaan dipengaruhi oleh orang lain, dan tidak memiliki tendensi menguasai yang lain (Sanderan, 2020). Kesadaran dan sikap inklusif tersebut mengasikan sikap subyektif dan egoistik dalam memahami teks. Menurut Gadamer, inilah yang menjadi kunci dasar menuju fusi horizon. Horizon pembaca dan obyek senantiasa bergerak, aktif, tidak tertutup, dan produktif. Sikap terbuka menempatkan pembaca pada kebenaran sejati teks yang terikat dengan konteksnya.

Gadamer menekankan bahwa fusi horizon bukanlah penggabungan di mana satu horizon menyerap yang lain, tetapi merupakan proses dinamis dan berkelanjutan dari dialog dan pemahaman. Ini melibatkan saling memberi dan menerima antara pembaca dan obyek, di mana kedua horizon berkontribusi dalam pembentukan makna bersama. Fusi horizon memungkinkan interpretasi yang lebih dalam dan komprehensif, melampaui prasangka individual dan perspektif terbatas. Ini mengakui sifat dinamis interpretasi dan peran aktif pembaca dalam berinteraksi dengan objek interpretasi melalui dialog yang produktif, di mana formula 'subjek-obyek' seperti 'aku-engkau' menghilang dan digantikan dengan 'kami' (Palmer, 2022).

Proses hubungan antara subyek dan obyek yang dipengaruhi oleh efek historis disebut sebagai penggabungan horizon (*fusion of horizons*). Gadamer mengklasifikasikan dialektika antara alienasi dan *re-fusion* ke dalam tiga bidang yang berbeda, yaitu estetika, sejarah, dan bahasa (Gadamer, 1989). Sejarah atau tradisi masa lalu harus dipahami berdasarkan horizon sejarah itu sendiri. Penafsir menempatkan dirinya dalam horizon sejarah tersebut agar dapat memahami signifikansi dari tradisi tersebut. Menurutnya, kesadaran sejarah dalam diri kita ialah kesadaran dalam 'kekinian'- di saat ini. Namun bersamaan dengan itu, yang 'kini' tersebut menampakkkan suatu rekaman segar (*fresh recording*) tentang 'masa lampau' dan terjadi semacam 'kebeluman saat'. Sehingga ketika seseorang menyadari atau mengetahui sebuah kejadian ia seakan berdiri di tengah rentetan kejadian itu sendiri, yakni rentetan dari apa yang 'sudah' dan 'sedang' terjadi. Dan pada saat itulah terjadi fusi horizon.

Selain itu, pembaca juga perlu memahami horizon dirinya sendiri sehingga terbentuklah persahabatan antara horizon tradisi dan penafsir. Pemahaman yang utuh tercapai dengan mempertemukan horizon masa lalu dan masa kini. Penggabungan horizon ini melibatkan kesadaran bahwa proses pemahaman (penafsiran) melibatkan horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca (H. Hasanah, 2017). Setiap horizon memiliki dunianya sendiri agar ketiganya dapat menyatu menjadi pemahaman baru yang lebih produktif. Gadamer menekankan bahwa horizon utama yang harus diperhatikan adalah horizon teks dan horizon pembaca. Seorang pembaca teks akan memulai dengan cakrawala hermeneutikanya sendiri, tetapi juga harus menyadari dan mengakui bahwa teks memiliki horizonnya sendiri yang berbeda dengan horizon pembaca, sehingga perlu dilakukan dialektika antara keduanya.

2.3. Sumbangan Gagasan Fusi Horizon dalam Hermeneutika Gadamer bagi Terbentuknya Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa"

2.3.1. Problematika seputar Perumusan Pancasila

Perumusan sila pertama Pancasila telah menjadi persoalan yang kompleks sejak awal kemerdekaan Indonesia (Santika et al., 2022). Beberapa permasalahan yang muncul dalam perumusan sila pertama Pancasila antara lain, ialah: *pertama*, pluralitas kepercayaan.

Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Ketika merumuskan sila pertama, tantangan besar adalah menemukan formulasi yang dapat mewakili semua kepercayaan yang ada di Indonesia tanpa mendiskriminasi atau mengabaikan salah satu agama atau kepercayaan tertentu. *Kedua*, kontroversi konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang digunakan dalam perumusan sila pertama menjadi sumber perdebatan dan perbedaan pendapat. Ada perbedaan pemahaman tentang apakah sila pertama mengacu pada konsep Tuhan dalam agama-agama tertentu atau pada prinsip keberagaman kepercayaan tanpa merujuk pada satu agama spesifik.

Ketiga, agama negara. Pertanyaan mengenai status agama dalam negara juga memengaruhi perumusan sila pertama. Ada pandangan yang berbeda tentang apakah Indonesia harus menjadi negara agama atau negara yang berdasarkan prinsip keberagaman agama. *Keempat*, sekularisme dan Islam. Perumusan sila pertama juga terkait dengan perdebatan tentang sejauh mana Islam berperan dalam negara dan kehidupan masyarakat. Terdapat pendapat yang berbeda mengenai perlunya memasukkan ajaran agama tertentu, terutama Islam, dalam perumusan sila pertama. Persoalan ini membuat proses perumusan sila pertama Pancasila menjadi tidak mudah karena beragama pandangan muncul dengan intensi berbeda-beda.

2.3.2. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai Hasil Fusi Horizon

Pembaca teks ‘pluralisme agama Indonesia’ adalah para *founding father* dan tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang. Dalam kegiatan dan usaha perumusan sila pertama Pancasila, mereka tidak bisa disangsikan sangat dipengaruhi oleh konteks historis dan sosial pada saat itu. Waktu itu, banyak tokoh dan pemimpin nasional memiliki latar belakang agama dan pemahaman keagamaan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Gadamer bahwa setiap individu selalu membawa seperangkat prasangka, bias, dan latar belakang budaya mereka dalam proses interpretasi dan pemahaman. Menurutnya, ketika kita mendekati sebuah teks, karya seni, atau bentuk ekspresi budaya lainnya, kita melakukannya dengan horizon harapan dan interpretasi. Horizon ini dibentuk oleh konteks sejarah dan budaya kita, bahasa kita, kepercayaan kita, dan pengalaman sebelumnya. Horizon ini menjadi kerangka yang digunakan untuk memahami realitas.

Konteks historis para pembaca teks ‘pluralisme agama Indonesia’ menjadi bekal bagi mereka dalam usaha memahami teks yang ada. Konteks historis memberikan pra-pemahaman atau prasangka hermeneutik dan menuntun pembaca menuju pemahaman ‘benar-salah’ teks tersebut. Selain itu, prasangka atau pra-pemahaman juga menegaskan kebenaran klaim bahwa pembaca teks ‘pluralisme agama Indonesia’ bukan kertas kosong. Konteks historis yang memberikan pra-pemahaman adalah fakta ketiadaan kekosongan pemahaman pembaca dalam membaca teks. Pembaca karena berasal dan lahir dalam konteks tertentu tidak bisa lari dari prasangka hermeneutik. Prasangka hermeneutik adalah sesuatu yang *in se* ada dan konsekuensi atau takdir keterlemparan manusia dalam sejarah. Ketika manusia ada dalam ruang dan waktu, ia tunduk pada seperangkat nilai, norma, ajaran, dan bahasa yang menyertai seluruh sejarah hidupnya.

Gadamer menekankan pentingnya transformasi prasangka atau pra-pemahaman dalam menafsir teks ‘pluralisme agama Indonesia’. Para *founding father* dan tokoh-tokoh nasional tidak bisa hanya berhenti pada pra-pemahaman mereka dan merasa puas dengan itu. Namun, pada saat menginterpretasi teks ‘pluralisme agama Indonesia’, pembaca mesti melampaui prasangka hermeneutik atau pra-pemahamannya agar berubah menjadi pemahaman yang lebih luas, dalam, dan autentik. Atau transformasi prasangka hermeneutik

perlu agar mereka tidak lagi memahami teks ‘pluralisme agama Indonesia’ sebagaimana sebelumnya, tetapi melangkah melampaui pra-pemahaman yang dipengaruhi oleh konteks historisnya. Sehingga, pada saat proses perumusan sila pertama Pancasila, pra-pemahaman mereka tidak lain ialah langkah awal bagi interpretasi selanjutnya dan bukan puncak dari sebuah interpretasi.

Namun, pertanyaan yang dapat diajukan ialah apakah semua pra-pemahaman bisa menjadi landasan bagi sebuah interpretasi? Gadamer memisahkan antara prasangka yang benar (*legitimate prejudice*) dan prasangka yang sewenang-wenang (*arbitrary prejudice*). Baginya, *arbitrary prejudice* tidak bisa digunakan dalam usaha mencari makna autentik teks, selain *legitimate prejudice*. *Legitimate prejudice* dapat diperoleh dengan melakukan dialektika dengan berbagai macam hal, dengan yang berlainan dan yang sependapat, baik dengan tradisi maupun dengan historisitasnya sendiri (Gadamer, 1989). Proses itu bersifat kontinu dan *legitimate prejudice* terjadi ketika pembaca membuat distansi dengan teks, meski tanpa menegasikan diri. Sehingga, dari proses yang panjang dan yang bersifat berkelanjutan itu prasangka sebelumnya yang terbatas berubah dan menghilang, sementara yang tertinggal hanyalah pemahaman yang benar.

Dalam proses perumusan sila pertama Pancasila, harus diakui bahwa masih terdapat di antara *founding fathers* dan beberapa tokoh nasional yang pra-pemahaman mereka tidak terjadi transformasi ke arah yang lebih luas, autentik, dan mendalam tatkala membaca teks ‘pluralisme agama Indonesia’. Konteks historis yang membentuk pra-pemahaman mereka menjadi semacam sumber kebuntuan pemahaman. Bahkan pra-pemahaman mereka justru dipandang sebagai kebenaran mutlak dan absolut dalam memahami teks tersebut. Hal ini tampak dalam tendensi untuk memutlakkan ajaran agama tertentu (Islam) sebagai sila pertama Pancasila. Misalnya, Mohammad Natsir senada dengan sila ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya’. Menurutnya, sila ini selaras dengan keberadaan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan penting untuk menghormati dan mempertahankan identitas Islam dalam kerangka negara yang berdasarkan Pancasila.

Persoalan pra-pemahaman yang tidak mengalami transformasi memberikan dampak negatif terhadap pemaknaan teks ‘pluralisme agama Indonesia’, yakni menjadi sempit dan dangkal serta mendapat kesan egoistis dan dominatif (Santika, 2021). Indonesia dipahami seolah-olah hanya sebatas agama tertentu (Islam), padahal nyatanya NKRI tersusun atas beragam agama yang berbeda-beda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, interpretasi teks ‘pluralisme agama Indonesia’ yang terkristalisasi dalam sila ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya’, membangkitkan diskursus rumit dan mendesak para *founding father* dan tokoh-tokoh nasional merangkak lebih jauh membaca teks yang ada agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik.

Menurut hermeneutika Gadamer, pra-pemahaman dari *founding fathers* dan tokoh-tokoh nasional akan mengalami transformasi dan menjadi jelas jika berani berkonfrontasi dengan berbagai sudut pandang seperti pendapat dari pakar dan pemikir lain. Melalui konfrontasi sehat dan logis, pembaca akan mampu mengidentifikasi pra-pemahaman atau prasangka mereka tentang teks yang diteliti. Pengidentifikasi dan merenungkan hal-hal ini memungkinkan setiap pembaca melampaui pra-pemahaman mereka, memahami fenomena yang ada tanpa pretensi subyektif, dan memperoleh kebenaran atau makna autentik teks, hingga melampaui batas pandangan mereka atas teks (Grondin, 2002). Sehingga, pada

gilirannya proses itu mendapatkan titik temu, yakni pembaca menemukan makna teks ‘pluralisme agama Indonesia’ yang sesungguhnya.

Beberapa pandangan yang dapat diidentifikasi dalam persoalan interpretasi teks ‘pluralisme agama Indonesia’ antara lain sebagai berikut. *Pertama*, pandangan Muhammad Hatta. Hatta berpendapat bahwa sila pertama haruslah mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. Baginya, sila pertama tidak boleh memaksa adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Menurut Hatta, negara harus bersikap netral dalam urusan agama dan menghormati kebebasan beragama setiap warga negara. *Kedua*, Soekarno. Sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno berpendapat bahwa sila pertama tidak boleh diartikan secara sempit sebagai mengharuskan seluruh rakyat Indonesia menganut Islam dan menjalankan syariat Islam. Baginya, sila pertama lebih merupakan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa tanpa membatasi kebebasan beragama (Hasanah & Budianto, 2020). *Ketiga*, pandangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa dan tokoh pendidikan, memiliki pandangan bahwa sila pertama mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan agama tertentu. Menurutnya, penting bagi negara Indonesia untuk menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan syariat agama di tengah masyarakat yang beragam.

Menguaknya aneka pandangan *founding fathers* dan tokoh-tokoh nasional ke ruang publik melahirkan diskursus dan konfrontasi, koreksi, pertukaran ide terjadi. Beragam pandangan yang mengalir ke jantung diskursus mencerminkan perbedaan gagasan dan sekaligus pluralitas pemahaman tentang sila pertama dan hubungannya dengan agama, kebebasan beragama, serta karakteristik negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim dan juga keberagaman agama lainnya. Menurut Gadamer, hal semacam ini menunjukkan perbedaan cakrawala berpikir dari setiap pembaca. Namun, horizon yang berbeda bukan menjadi alasan untuk menutup diri dan memisahkan antara pembaca yang satu dan yang lainnya (Prasetyono, 2022). Melainkan, perbedaan horizon berpikir menjadi undangan untuk melakukan dialog agar pra-pemahaman tidak menjadi kebenaran mutlak dan mendiskreditkan kebenaran yang lain.

Gadamer mengamini bahwa tidak ada horizon yang tertutup dan apa lagi ditutup-tutupi. Baginya, usaha membentengi horizon dengan horizon yang lain hanya akan melawan kodrat manusia dan mobilitas historis dari keberadaan manusia, manakala ‘horizon adalah sesuatu dalam mana kita bergerak dan bahwa horizon itu bergerak bersama kita’ (Gusmão, 2013). Fakta adanya mobilitas horizon adalah gerbang menuju sebuah perjumpaan dengan horizon yang lain. Perjumpaan horizon yang menciptakan konfrontasi terbuka, melampaui ke-aku-an setiap pembaca, dan kesediaan hati menerima horizon yang baru yang bersifat inklusif dan mencakup setiap yang partikular.

Penting untuk dicatat bahwa menurut Gadamer, pemahaman bukanlah tindakan yang sepenuhnya subjektif, tetapi selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya di mana pemahaman itu terjadi. Gadamer menolak gagasan bahwa ada makna yang tetap dan objektif yang bisa diungkapkan melalui interpretasi. Sebaliknya, makna muncul melalui interaksi dinamis antara penerjemah dan objek interpretasi. Hal ini menekankan pentingnya dialog dan interaksi dengan orang lain untuk memperluas dan mengubah horizon pemahaman kita, yang pada akhirnya akan menghasilkan interpretasi yang lebih kaya terhadap dunia di sekitar kita.

Founding fathers dan tokoh-tokoh nasional melakukan dialog terbuka dalam proses perumusan sila pertama Pancasila untuk mempertemukan perbedaan horizon berpikir di

antara mereka. Melalui dialog terbuka itu, mereka ke luar dari ruang ketertutupan diri dan aneka fakta historis yang menyertainya, lalu melebur dengan horizon yang lain sehingga terciptalah relasi -aku-engkau' menjadi 'kami'. Menurut Gadamer, dialog dan interaksi dengan yang lain membantu memperluas wawasan dan cakrawala berpikir seseorang. Ketika pembaca berhadapan dengan sudut pandang yang berbeda atau terlibat dalam percakapan yang tulus, horizon pemahamannya dapat diuji dan berubah. Inilah yang terjadi dan ditemukan dalam dialog terbuka *founding fathers* dan tokoh-tokoh nasional, yakni teks 'pluralisme agama Indonesia' tidak lagi dipahami hanya sebatas agama Islam, tetapi mencakup agama-agama lainnya.

Dialog terbuka di antara para *founding father* dan tokoh-tokoh nasional pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut Gadamer, 'fusi horizon'. Menurutnya, konsep horizon menampakkannya karena ia mengungkapkan ilham yang lebih tinggi dari wawasan bahwa seseorang sedang berusaha untuk memahami teks. Fusi horizon terjadi ketika seseorang belajar memandang lebih jauh dari apa yang sedang di genggamnya-tidak untuk berpaling darinya, melainkan melihatnya lebih baik, lebih luas, dan lebih benar dalam keseluruhannya (Gusmão, 2013). Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat diskusi, dialog, dan kompromi yang melibatkan berbagai tokoh dan pemikir (Wahid, 2023). Pandangan yang akhirnya terwakili dalam teks resmi Pancasila adalah 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukan 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya'.

Sila pertama Pancasila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' adalah hasil "peleburan horizon" dari proses interpretasi teks 'pluralisme agama Indonesia'. *Founding fathers* dan berbagai tokoh nasional melakukan diskursus dan dialog dengan teks tersebut, sehingga memungkinkan objek interpretasi berbicara kepada mereka dan menantang pemahaman awal atau pra-pemahaman mereka. Melalui proses itu, horizon *founding fathers* dan horizon objek interpretasi melebur dan bersatu, menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Tujuan utamanya ialah menciptakan landasan yang dapat diterima oleh berbagai pihak dan mempromosikan kehidupan beragama yang damai dan harmonis dalam negara yang beragam secara keagamaan.

2.3.3. Fusi Horizon sebagai Upaya Deradikalisme Agama

Dewasa ini panggung-panggung publik disibukkan oleh persoalan penting dalam peradaban hidup manusia yakni radikalisme. Indikasi utama merebaknya tindakan radikal tersebut ialah teks suci (agama) yang dilihat seakan-akan mempunyai kekuatan atau daya. Sejatinya, teks yang ada di hadapan pembaca tidak mempunyai *powerful* apapun. Namun, pembaca yang mengklaim kemutlakan kebenaran atasnya (teks) membuat hidup manusia sebagai sasaran perbudakan oleh teks. Kenyataan ini semakin diperparah lagi ketika pembaca menafsirkan teks-teks suci dengan mengatas namakan Tuhan, demi kehendak Tuhan, dan untuk membela Tuhan (A. Wahid, 1999), serta dipersempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologis dan *platform* politik (A. Wahid, 2009). Dalam konteks ini, orang lain sering kali dituduh sebagai kafir dan murtad (Maula, 2020). Bahkan agama digunakan untuk menjustifikasi tindakan kekerasan dan pembunuhan yang nyata dalam tindakan rela mati demi membela agama (Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, 2014).

Bringasnya kehadiran agama di ruang publik, di satu sisi menampilkan kerdilnya pemahaman dan penghayatan iman seseorang. Di sisi lain, dalam konteks Indonesia kehadiran kelompok-kelompok garis keras sejatinya memiliki satu tujuan, yakni mendirikan

negara Islam atau sekurang-kurangnya mengupayakan agar syariat Islam menjelma dalam gerak hidup setiap insan meski yang berbeda sekalipun. Secara historis, Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) pernah dideklarasikan oleh S. Maridjan Kartosuwirjo di Jawa Barat, yang kemudian diikuti oleh Daud Beureuch di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Deklarasi pendirian negara Islam itu diperkuat dengan aneka Perda-perda Syariah. Melalui peraturan daerah tersebut, dikumandangkanlah konsep bahwa Islam merupakan agama paling sempurna, karenanya pantas dijadikan referensi tunggal dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Sehingga muncullah slogan, seperti; 'Selamatkanlah Indonesia dengan syariah' (HTI) (Tahrir, 2006), 'Penegakan syariah melalui institusi negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kemelut bangsa' (MMI) (Jahroni, 2004), 'krisis multidimensi akan berakhir dengan diberlakukannya syariah Islam' (FPI) (Simanjuntak, 2000), 'Islam adalah solusi' (PKS), dan sebagainya.

Penerapan syariat Islam sangat jelas bertentangan dengan Pancasila. Sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hasil fusi horizon para *founding father* dan tokoh-tokoh nasional adalah sebuah usaha sadar untuk mendamaikan keegoisan dan sikap eksklusivitas tafsiran atas teks 'pluralisme agama Indonesia'. Tendensi dan ambisi menerapkan kembali Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya" hanyalah biang dari segala persoalan dan disintegrasi bangsa. Sikap memaksakan syariat Islam sebagai dasar ideologis NKRI tidak lebih dari sekadar 'mimpi absurd'. Teks 'pluralisme agama Indonesia' bagaimanapun tidak bisa ditafsirkan secara tunggal karena Indonesia bukan hanya Islam, tetapi memuat agama dan kepercayaan lainnya. Penafsiran tunggal atas realitas Indonesia yang plural adalah cetusan dari keangkuhan dan sikap manipulatif atas kebenaran dan makna autentik teks (Haryatmoko, 2015).

Gagasan hermeneutika Gadamer membangkitkan kesadaran berpikir kita untuk menerima perbedaan pemahaman teks 'pluralisme agama Indonesia' sebagai konsekuensi dari konteks historis bangsa yang plural dan pra-pemahaman adalah undangan untuk semakin terbuka dan berani berdialog satu dengan yang lain. Menurut Gadamer, tidak ada fusi horizon tanpa dialog (Rahardjo, 2020). Dialog membantu manusia Indonesia untuk terus mengalami transformasi pra-pemahamannya yang sempit menuju pemahaman yang lebih luas dan mendalam atas teks 'pluralisme agama Indonesia'. Dialog terbuka memungkinkan deabsolutisme kebenaran tafsir dan deradikalisasi dogma agama yang marak terjadi dewasa ini. Singkatnya, kunci utama agar sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' sebagai hasil fusi horizon tetap menjadi peredam radikalisme agama, landasan ideologis, dan perekat pluralitas agama menuju harmonisasi Indonesia adalah merawat dialog. Sebab, identitas Indonesia kita adalah apa yang kita ukir melalui tindakan dan praktik kita dalam kehidupan sehari-hari dalam mengejar cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa (Wijanarko & Saeng, 2022).

3. Kesimpulan

Pluralisme agama di Indonesia merupakan teks yang menuntut setiap pribadi membaca dan memahaminya secara serius dan mendalam. Aktivitas ini penting mengingat tidak sedikit orang atau kelompok memiliki tendensi memutlakkan kebenaran tafsiran mereka dan memaksakannya kepada orang lain. Sejak proses perumusan sila pertama Pancasila fenomena ini terjadi dan menimbulkan perdebatan sengit. Golongan tertentu (Islam) menghendaki dasar NKRI atas syariat Islam. Sementara kelompok nasionalis bersikap inklusif, integratif, dan menginginkan sila pertama Pancasila harus mencakup semua agama bukan Islam semata. Berhadapan dengan problematika

tersebut, para *founding father* dan tokoh-tokoh nasional berunding dan berdialog satu sama lain, sehingga terbentuknya kesatuan paham, yakni ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ sebagai cetusan kehendak bersama demi persatuan dan keharmonisan Indonesia. Penulis melihat bahwa seluruh proses itu tidak terlepas dari kerangka kerja hermeneutika Gadamer, yakni adanya pra-pemahaman, lingkaran hermeneutis, relasi ‘aku-engkau’ menjadi ‘kami’, hermeneutika dialektis, dan fusi horizon. Sehingga, sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang resmi saat ini tidak lain ialah hasil fusi horizon dari *founding fathers* dan para tokoh nasional bangsa Indonesia. Namun, sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang telah disepakati bersama harus disadari tidak menuntaskan perbedaan intensi dan perdebatan yang ada. Kelompok garis keras Islam hingga kini masih memiliki hasrat dan terus berjuang untuk mengembalikan sila ‘Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya’. Karena itu, proses fusi horizon sebagaimana digagas Gadamer aktual sepanjang zaman dan mesti terus direalisasikan. Sehingga tendensi naif dari kelompok tertentu yang hendak memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, Y. (2014). Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di Ruang Publik yang Plural. In *Diskursus2* 17(1).
- Gadamer, H.-G. (1989). *Truth and Method* (Weinsheimer dan Donald G. Marshall (ed.); Edisi Revi). Continuum.
- Grondin, J. (2002). *Gadamer's Basic Understanding of Understanding* (R. J. Dostal (ed.)). Cambridge University Press.
- Gusmão, M. G. da S. (2013). *HANS-GEORGE GADAMER: Penggagas Filsafat Hermeneutik Modern yang Mengagungkan Tradisi*. Kanisius.
- Haryatmoko. (2015). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas.
- Hasanah, H. (2017). Hermeneutik Ontologis-Dialektis Hans-Georg Gadamer. *Jurnal At-Taqaddum*, 9(1), 1-33.
- Hasanah, U., & Budianto, A. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Candi*, 20(2), 31-53.
- Hidayat, S., & Abdul, W. B. (2021). Kajian Hermeneutika Interpretasi Al-Adab Fii Majlisi At-Ta'allumi Kitab Tanbihul Muta'allim Karya Kh. Ahmad Maisur Sindi Attursidy (Analisis Etik, Moral Dan Akhlak Di Dalam Majelis Pembelajaran). *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.24235/jy.v7i1.7813>
- Jahroni, J. dan J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Rajawali Press.
- Kau, S. A. P. (2014). Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir. *Farabi (e-Journal)*, 11(2), 109-123. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa%0Ahttps://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/782>
- Kushidayati, L. (2014). Hermeneutika gadamer dalam kajian hukum. *Yudisia*, 5(1), 64-82.
- Maula, B. S. (2020). Radikalisme Islam Sebagai Problem Bagi Bangsa Indonesia Di Masa Kontemporer. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6(1), 147. <https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.6772>
- Palmer, R. E. (2022). *Hermeneutika: Teori Interpretasi dalam Pemikiran Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, dan Gadamer* (S. A. Herwinarko (trans.)). IRCiSoD.
- Prasetyono, E. (2022). Menggagas Fusi Horizon Dalam Hermeneutika Hans Georg Gadamer Sebagai Model Saling Memahami Bagi Dialog Antarbudaya Dengan Relevansi Pada Pancasila

- Sebagai Landasan Dialogis Filosofis. *Studia Philosophica et Theologica*, 22(1), 63-95. <https://doi.org/10.35312/spet.v22i1.431>
- Rahardjo, M. (2020). *Hermeneutika: Menggali Makna Filosofis Teks*. Intrans Publishing.
- Sanderan, R. (2020). INTUISSI: Pendalaman Gagasan Hans-George Gadamer tentang Intuisi sebagai Supralogika. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2(2), 114-125. <https://doi.org/10.37364/jireh.v2i2.39>
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Simanjuntak, T. (2000). *Premanisme Politik*. ISAI.
- Tahrir, H. (2006). *Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah*. HTI Press.
- Wahid, A. (1999). *Tuhan Tidak Perlu Dibela*. LKIS.
- Wahid, A. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Tradisional di Indonesia*. The Wahid Institute dan Maarif Institute.
- Wahid, D. N. (2023). Judicial Partner : Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 03(01), 57-69.
- Wijanarko, R., & Saeng, V. (2022). Human Beings and Social Structure in Frantz Fanon's Philosophical Thought. *Jurnal Filsafat*, 32(1), 87. <https://doi.org/10.22146/jf.66631>